PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 2, Juli (2021)
e-ISSN: 2797-0469

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA KANTOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Ahmad Salman Al Farisi
Program Studi Administrasi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
farisobgb@gmail.com

Teguh Santoso
Program Studi Administrasi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
teguhuntagsby@gmail.com

Endang Indartuti
Program Studi Administrasi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
indartuti65@gmail.com

ABSTRACT

The city of Surabaya itself has received an award as a city that has implemented good governance at the world level. However, the facts in the field are still found some principles of good governance that have not been applied, therefore it is necessary to conduct research on the application of good governance in central agencies in the city of Surabaya. In this study, the object chosen was the Government Administration and Regional Autonomy Section, because this agency is a central part of the process of governance and autonomy in the city of Surabaya. This type of research is qualitative, which from this research shows that there are 2 principles that are not implemented properly there, namely transparency and efficiency, limited access to information to the public because only the SITOMAS application can be accessed by the public. Then for efficiency, sometimes many tasks overlap because there are many complaints from the public who come to the BAPOD office even though it is not their job, as a result many tasks are not completed according to the deadline.

Keywords: *Implementation, Good Governance Principles, Surabaya City*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang termasuk ke dalam salah satu negara yang sedang berkembang di benua Asia, khususnya di Asia Tenggara. Pada sekitar tahun 1997 di Negara Indonesia mengalami krisis moneter, permasalahan ini disebabkan oleh banyaknya konflik yang terjadi di dalam negeri.

Kemudian pada awal tahun 1998 akhirnya Indonesia bisa keluar dari keadaan krisis tadi dan mengalami reformasi dan mulai melakukan pembangunan untuk bisa bangkit lagi. Seiring berjalannya waktu *World Bank* membuat persyaratan untuk negara-negara berkembang yang mau meminjam uang harus menerapkan tata kelola pemerintahan berdasar pada konsep *good governance*, pada akhirnya semua organisasi publik harus bisa menerapkan dan menganut konsep *good governance* agar menciptakan sebuah tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih. Organisasi pemerintah, baik badan maupun instansi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan berlandaskan kepada salah satu konsep prinsip *good governance.* Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang setiap kinerjanya selalu menerapkan prinsip *good governance*. Penjelasan tadi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh *UNDP (United Nation Development Programme)* sebagai berikut: partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

Sejauh ini penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah kota Surabaya sepertinya sudah cukup bagus, buktinya pada laman *www.suarasurabaya.net* (2014) mempublikasikan bahwa Kota Surabaya mendapatkan penghargaan level dunia dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam publikasi tersebut penulis memaparkan bahwa pemerintah lebih banyak mengupas mengenai *Government Resources Management System* (GMRS) untuk menggantikan tata cara manual, hal itu dilakukan agar kinerja pemerintahan di Kota Surabaya lebih efektif dan efisien dalam melakukan proses pemerintahan. Namun masih ada beberapa prinsip yang dirasa masih belum terpenuhi dan belum ter implementasikan dengan baik, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.

Melihat dari permasalahan yang terjadi diatas perlu adanya penelitian ulang mengenai kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi publik dengan berpegang kepada prinsip-prinsip *good governance* khususnya di badan-badan dan dinas-dinas pemerintahan yang memberikan pelayanan di organisasinya masing-masing untuk mengetahui dan mengevaluasi organisasi yang berkaitan sehingga penerapan prinsip-prinsip *good governance* bisa tercapai dan kualitas pelayanan dari masing-masing badan maupun dinas terkait menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Salah satu tempat yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah kantor BAPOD(Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Pemerintah Kota Surabaya.

Awal mula peneliti berminat untuk menjadikan kantor tersebut sebagai objek karena kita juga tahu bahwa pada BAPOD Kota Surabaya adalah instansi sentral yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Kota Surabaya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut pasti memiliki dampak bagi tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Surabaya. Saat menjalani kegiatan magang di kantor tersebut, peneliti melihat pada pemerintah Kota Surabaya khususnya pada kantor bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah untuk segi transparansi dan keterbukaan acces kepada masyarakat masih kurang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya, hal ini

dibuktikan dengan melihat pada laman web Pemerintah Kota Surabaya khusunya pada kantor bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yakni www.pemerintahan.surabaya.co.id. Pada laman web tersebut bisa dilihat sangat minim sekali informasi mengenai kegiatan apa saja yang sedang dilakukan di kantor bagian BAPODPemerintah Kota Surabaya.

B. METODE

Menurut Sukmadinata (2006:72) mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fakta dan kondisi pada suatu objek, baik secara alami maupun buatan manusia. Dalam penelitian ini analisis datanya bersumber dari pendapat orang lain yang biasa disebut narasumber, baik itu berbentuk lisan maupun kata-kata tertulis. Penelitian ini menganggap bahwa penelitit adalah instrumen kunci dimana dia lah yang melakukan proses pengumpulan data-data yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *UNDP (United Nation Development Programme* (dalam Nugroho, D, 2003; Mardiasmo, 2002; LAN, 2000) yang terdiri dari partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan data dan hasil yang akurat, oleh karena itu peneliti melakukan beberapa tahap dalam proses penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data, analisis data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di kantor BAPOD Pemerintah Kota Surabaya.

B. HASIL & PEMBAHASAN

United Nation Development Program (UNDP) menyebutkan bahwa *good governance* bertujuan untuk menjadikan administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat dengan berpartisipasi menyuarakan pendapat dan mengurangi penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa keputusan dan proses pelaksanaannya terbuka dan mudah dimengerti. Semua kegiatan dan pekerjaan di kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya (BAPOD) ini berdasarkan pada Perwali Kota Surabaya No 44 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Logo mereka sendiri adalah *good governance* dimana semua yang mereka lakukan adalah untuk meciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surabaya. Namun faktanya kegiatan yang mereka lakukan banyak yang tidak dibuka untuk umum, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian agar bisa melihat sejauh mana penerapan prinsip good governance di kantor BAPOD.

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan topik penerapan *good governance* di kantor bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah Kota Surabaya berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh UNDP (dalam Nugroho, D,2003;Mardiasmo,2002;LAN,2000) yakni partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada

konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis mendapakatkan hasil sebagai berikut :

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa masyarakat bisa terlibat juga bisa tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di instansi BAPOD. Disini masyarakat hanya terlibat dalam pelaporan masalah melalui kegiatan musrenbang dimana semua data pengaduan dan permasalahan yang ada dari masyarakat akan ditampung oleh RT/RW lalu disampaikan ke kelurahan maupun kecamatan kemudian dilaporkan ke kita untuk proses penyeleseainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rendy selaku staff sub bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah BAPOD.

> "Masyarakat disini bisa terlibat bisa juga tidak, masyarakat yang terlibat contohnya seperti kegiatan musrenbang dimana usulannya berawal dari RT, RW, LPMK, Kelurahan, Kecamatan baru sampai ke kita. Karena kita tidak tahu kalau tidak ada usulan dari masyarakat seperti banjir, fasilitas jalan dan sebagainya". (Wawancara diambil pada tanggal 25 Mei 2021)

Supremasi Hukum

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa supremasi hukum disini sudah diterapkan dengan baik sesuai perda yang ada, namun belum bisa 100%. Buktinya masih ada pegawai yang tidak taat pada aturan, seperti terlambat masuk kerja dan juga ketika ada kegiatan di luar kantor ada pegawai yang tidak datang saat acara berlangsung. Untuk yang terlambat tadi terkadang masih di toleransi selama pekerjaannya selesai. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulchaidir selaku kepala sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

> "Penegakan hukum di instansi kita juga sudah diterapkan dengan baik sesuai perwali maupun perda yang berlaku, namun terkadang masih saya temui ada beberapa pegawai yang telat datang ke kantor. Selebihnya menurut saya sudah diterapkan dengan bagus". (Wawancara diambil pada tanggal 20 Mei 2021)

Transparansi

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa di kantor ini sebenarnya belum sepenuhnya transparan. Karena kegiatan atau pekerjaan disini ada yang di publish ada yang tidak. Pada kantor ini yang dibuka hanya aplikasi SITOMAS saja yang berisi tentang informasi tokoh masyarakat seperti Ketua RT, RW, Lurah, Camat, dan ketua LPMK saja. Sedangkan untuk aplikasi yang lainnya tidak di publish karena berkaitan dengan data internal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulchaidir selaku kepala sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

> "Kalau untuk transparansi disini memang ada yang di publish kepada masyarakat ada yang tidak, seperti data LPPD itu tidak boleh di publish ke masyarakat karena sifatnya privasi". (Wawancara diambil pada tanggal 20 Mei 2021)

Daya Tanggap

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa semua permasalahan yang suratnya datang dari Walikota langsung maupun dari

aplikasi sapawarga atau aplikasi wargaku dan masuk ke BAPOD akan langsung di proses sesuai dengan arahan pimpinan instansi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mas Adit selaku staff sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga menambahkan.

> "Kalau untuk sekarang sudah ada aplikasi wargaku untuk melaporkan permasalahan yang ada, lalu menunggu arahan dari pimpinan pusat untuk proses lebih lanjutnya". (Wawancara diambil pada tanggal 28 Mei 2021)

Orientasi Pada Konsensus

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa setiap permasalahan yang masuk pasti langsung di proses oleh BAPOD dengan cara koordinasi dengan OPD terkait sesuai dengan pengaduan yang dilaporkan kemudian dipilih masalah mana yang paling *urgen* atau mendesak dahulu itu yang di dahulukan. Contohnya seperti kerusakan fasilitas jalan bisa koordinasi dengan Dishub tentunya dengan RT, RW, Lurah atau Camat setempat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulchaidir selaku kepala sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

> "Jadi ketika menerima pengaduan kegiatan masyarakat terutama melalui RT, RW dan LPMK maka akan kita fasilitasi baik dari kelurahan atau kecamatan, contoh terkait dengan PKL kemudian maka kita akan koordinasikan dengan camat dan lurah setempat kemudian kita koordinasikan dengan satpol pp dengan instansi-instansi terkait apabila berkaitan dengan saluran kita akan koordinasikan dengan teman-teman di Bina Marga". (Wawancara diambil pada tanggal 20 Mei 2021)

Kesetaraan

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa pelayanan instansi ini terhadap pengaduan masyarakat sudah menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Semua pengaduan yang masuk langsung di proses tanpa memandang latar belakang mereka baik dari segi pendidikan maupun ekonomi mereka, namun dengan catatan mereka warga Kota Surabaya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriono selaku Lurah Medokan Semampir.

> "Tidak pernah pandang bulu, langsung ditindak lanjuti ketika kita melapor terkait pengaduan masyarakat" (Wawancara diambil pada tanggal 25 Juni 2021)

Efektif dan Efisiensi

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa kinerja dari BAPOD sudah efektif karena mereka selalu bekerja sesuai tupoksi organisasi dan sub bagiannya masing-masing, namun dari segi efisiensi belum berjalan maksimal karena banyaknya pengaduan yang datang ke BAPOD, padahal seharusnya bukan tugas kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, ditambah dengan terbatasnya komputer yang ada di kantor dan juga terkadang jaringan juga lambat, akibatnya permasalahan tadi tidak terselesaikan sesuai deadline yang ditetapkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rendy selaku staff sub bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah.

> "Saya rasa sudah sangat efektif karena kita tidak hanya bekerja berdasarkan tujuan utama organisasi saja, namun ketika ada perintah dari pimpinan yang diluar dari tupoksi kita, mau tidak mau harus kita kerjakan juga. Kalau

efisiensi masih kurang karena ya itu tadi, kita bekerja kadang diluar tupoksi dari BAPOD sendiri, dilain sisi juga terbatasnya komputer di kantor dan pada akhirnya banyak waktu terbuang untuk penyelesaian dari pekerjaan tadi". (Wawancara diambil pada tanggal 25 Mei 2021)

Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD (Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Kota Surabaya dapat dilihat bahwa semua kegiatan pada instansi ini sudah sesuai perda yang ada. Setiap pengeluaran anggaran selalu ada surat pertanggung jawabannya (SPJ). Setiap kegiatan juga ada dokumentasi dan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kinerja BAPOD. Kemudian pada akhir tahun mereka ada laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) yang dilaporkan ke provinsi dan pusat untuk pertanggungjawaban kinerja mereka selama satu tahun. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulchaidir selaku kepala sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

"Akuntabilitas kinerja di kita sudah diterapkan, melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) ini kita laporkan setiap satu tahun sekali baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat". (Wawancara diambil pada tanggal 20 Mei 2021)

Visi Strategis

Dalam pelaksanaan kinerja BAPOD Kota Surabaya dapat dilihat bahwa kinerja di BAPOD ini sudah sesuai dengan visi misi organisasi yakni berpatokan pada *Good Governance,* bahkan kalau ada tugas diluar tupoksi BAPOD namun ada arahan dari pimpinan tetap mereka kerjakan dan selesaikan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Yudi selaku staff sub bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

"Visi Misi kita disini adalah memberikan pelayanan sesuai *good governance,* oleh karena itu kita bekerja dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". (Wawancara diambil pada tanggal 25 Mei 2021)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasana tentang penerapan prinsip *good governance* pada kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) Kota Surabaya sudah bisa terbilang cukup bagus, baik itu dari sudut pandang pegawai BAPOD, dari kelurahan dan kecamatan, dan juga dari sudut pandang masyarakat. Namun ada 2 prinsip yang tidak diterapkan dengan baik disana yaitu transparansi dan efisiensi, seperti akses informasi yang terbatas kepada masyarakat karena hanya aplikasi SITOMAS saja yang bisa diakses oleh masyarakat dengan alasan aplikasi yang lain berkaitan dengan data internal, bahkan masyarakat saja juga tidak paham terkait transparansi dari pemkot. Kemudian untuk efisiensi terkadang banyak tugas yang tumpang tindih karena ada banyak pengaduan masyarakat yang datang ke kantor BAPOD padahal itu bukan tugas dan wewenaang mereka, akibatnya banyak tugas yang tidak terselesaikan sesuai deadline. Ditambah lagi masalah jaringan dan juga

terbatasnya komputer yang mengakibatkan terhambatnya kinerja dari tim BAPOD sendiri.

Dari kesimpulan yang ada saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan penerapan prinsip good governance pada kantor BAPOD Pemerintah Kota Surabaya adalah: 1) Untuk prinsip efisiensi, kepada Kepala BAPOD harus bisa lebih tegas lagi dalam hal pengambilan keputusan, jikalau ada tugas tambahan dari Walikota mungkin bisa meminta bantuan kepada instansi maupun dinas lain agar tidak menghambat dari tugas dan fungsi pokok dari BAPOD sendiri. Dan juga bisa menambah jumlah komputer dan kecepatan jaringan yang ada agar pekerjaan bisa lebih cepat terselesaikan; 2) Untuk transparansi setidaknya BAPOD harus memberikan akses informasi mengenai setiap kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat, minimal selalu update setelah melakukan kegiatan pada web instansi BAPOD tujuannya agar masyarakat tahu cara kerja mereka itu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

Almas, Y. A., & Andayani, A. (2020). Implementasi Good Governance dan Single Window dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi UPTSA SIOLA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *Vol. 9*(4).

Astuti, A. D., & Muna, A. (2019). Implementasi Good Governance pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Kelitbangan. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, *Vol. 4*(2).

Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2018). Analisis Fungsi dan Peran Humas dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin). *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, *Vol.2*(1).

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *Vol.11*(1), 1-11.

Pramudya, A. S. (2017). Implementasi Konsep Good Governance dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Sari, S. (2020). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. *1*(5), 271-278.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.*JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, *6.*

Tamawiwi, F., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud. *Jurnal Eksekutif*, *Vol*. *2*(2).

United Nations Development Programme,1999, 'Decentralization: A Sampling of Definitions', Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.